



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Tahun Sidang** : 2020/2021  
**Masa Persidangan** : I  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Hari, Tanggal** : Selasa, 22 September 2020  
**Pukul** : 14.00-15.32 WIB  
**Sifat** : Terbuka  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  
**Ketua Rapat** : H. M. Ihsan Yunus, M.E. Con. Std.  
**Acara** :

1. Penyesuaian RKA K.L  
Kementerian PPPA RI sesuai  
Hasil Pembahasan Badan  
Anggaran;
2. Isu-isu Aktual dan Solusinya.

**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

**Hadir** : 30 dari 52 orang Anggota Komisi VIII DPR RI

**PIMPINAN :**

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. H. M. Ihsan Yunus, BA., B.Comm.,  
Me.Con. Std. (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-  
PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA.  
(F-Partai Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

**ANGGOTA :**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Ina Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S. Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Mohammad Saleh, SE.
19. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
20. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

24. Muhammad Rahul
25. H. Jefri Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Murhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. Muhammad Rapsel Ali

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, SE.
40. Wastam, SE., SH.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. H. Sungkono
50. M. Ali Taher, SH., M.Hum.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

**Izin  
Undangan**

: 3 orang Anggota Komisi VIII DPR RI  
: Menteri KPPPA RI beserta jajaran.

## **JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. M. IHSAN YUNUS, B.A., B.Comm., M.E.Con, Std.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh jajarannya.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI.**

Mengawali rapat pada pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA Republik Indonesia.

Sebelum acara ini kami lanjutkan marilah kita bersama-sama membaca doa untuk kesuksesan dan kelancara acara kita pada hari ini bagi yang muslim saya persilakan membaca ummul kitab atau al fatiha. Bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Al fatihaa mulai. *Bismillahirohmanirrohim.* Selesai.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I tahun 2020/2021 yang telah diputuskan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR tanggal 13 Juli 2020 dan juga sesuai keputusan rapat antara Komisi VIII tanggal 18 Agustus 2020 maka pada hari ini Selasa, 22 September 2020 Komisi VIII DPR RI akan menyelesaikan Rapat Kerja dengan Agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Tahun 2021 Kementerian PPPA Republik Indonesia dan isu-isu aktual.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII pada rapat kali telah hadir 8 anggota. secara fisik 8 anggota dan virtual 27 anggota dan ada 7 fraksi yang sudah hadir. Maka hal ini rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dan fraksi sesuai dengan Tata Tertib DPR maka kuorum telah tercapai dan atas persetujuan Saudara Menteri PPPA Republik Indonesia, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka. Setuju?

### **(RAPAT DIBUKA)**

Sesuai dengan yang telah disampaikan rapat pada hari ini diacarakan sebagai berikut:

1. Yang pertama pengantar ketua rapat.
2. Yang kedua penjelasan dari Menteri PPPA RI mengenai penyusunan RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual.
3. Yang ketiga tanya jawab,
4. Yang keempat kesimpulan, dan;
5. Yang terakhir penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

Selanjutnya rapat ini akan kita akhiri pada pukul 15.30 ya? Nanti kalau bisa lebih cepat kita percepat 15.30.

**(RAPAT: DISETUJUI)**

**Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kami hormat.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PPPA RI yang telah hadir memenuhi undangan rapat Komisi VIII DPR RI pada hari ini. Rapat ini mempunyai nilai yang strategis karena membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran tahun 2021 dan juga isu-isu aktual. Kami perlu menyampaikan bahwa saat ini diselenggarakan sebagai kelanjutan hasil Rapat Kerja pembahasan RKA K/L dengan Menteri PPPA RI pada tanggal 2 September 2020 dan juga Rapat Dengar Pendapat pendalaman RKA K/L dengan para pejabat eselon 1 Kementerian PPPA pada tanggal 10 September 2020. Dalam rapat tersebut disimpulkan:

1. Yang pertama, Komisi VIII dapat menerima Pagu Anggaran Kementerian PPPA tahun 2021 sebesar Rp.279.568.938.000. Pagu Anggaran Kementerian PPPA RI tahun 2021 terdiri atas:
  - a. Alokasi program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp.137.216.523.000.
  - b. Dan juga alokasi untuk program dukungan manajemen sebesar Rp.142.352.415.000.
2. Kedua, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian PPPA RI segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus PPPA tahun 2021 yang disimulasikan sebesar Rp.101.747.000.000 untuk program non fisik perlindungan perempuan dan anak dan sehingga dapat segera diimplementasikan di 34 provinsi dan 216 kabupaten dan kota.
3. Bahwa Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dengan memprioritaskan pada penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak serta penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang terdampak Covid-19.

**Ibu/Bapak yang berbahagia.**

Dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran Komisi VIII DPR pada rapat hari ini ada beberapa hal pokok yang menjadi pokok pembahasan yang pertama bagaimanakah rincian penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar Tahun 2021 Kementerian PPPA Republik Indonesia yang diperuntukkan dalam program prioritas nasional dalam bidang kesetaraan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang partisipasi masyarakat, bidang perlindungan hak perempuan, bidang perlindungan

khusus anak? Yang kedua bagaimanakah rincian petunjuk teknis DAK PPPA tahun 2021 yang disimulasikan sebesar Rp.101.747.000.000 untuk program non fisik perlindungan perempuan dan anak di 34 provinsi dan 216 kabupaten dan kota, berikut program inovasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat dijelaskan dan diukur secara kualitatif dan kuantitatif, target sasaran, serta manfaat atau output baik langsung maupun tidak langsung?

**Hadirin yang kami hormati.**

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan sesuai dengan acara yang telah kita sepakati. Mari kami persilakan kepada Saudara Menteri PPPA RI untuk menyampaikan penjelasannya. Namun kita juga sama-sama sudah tahu tadi hasil laporan dari Banggar bahwa tidak ada perubahan artinya memang rapat ini mungkin karena juga melihat kondisi Covid Ibu Menteri kita tidak lama-lama karena memang hanya sekedar ketok anggaran saja yang sudah dibahas di Banggar. Kalaupun ada isu-isu aktual mungkin waktunya lebih efisien, lebih efektif karena kemarin juga kami baru saja mendapatkan berita yang kurang menyenangkan bahwa Pak Menteri Agama Fahrul Razi dinyatakan positif Covid. Dan kita semua baru saja rapat dan beliau sering datang ke sini untuk rapat bersama kita. Jadi untuk menjaga kondusifitas suasana maka rapat ini memang kita buat sangat terbatas seperti Ibu lihat anggotanya cuma dua, pimpinannya dua. Jadi kapalnya imbang ada, dua anggota dua pimpinan. Kalau pimpinan aja anggotanya nggak ada, nggak tahu siapa yang dipimpin siapa yang memimpin. Oh tambah 3. Ya silakan Ibu menteri.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Sidang.**

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII DPR RI.**

**Para Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.**

**Hadirin yang berbahagia.**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Salam sejahtera.*

*Shalom.*

*Om Swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

*Salam kebajikan.*

*Tentunya salam sehat untuk kita semua.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan kekuatan dan semangat kepada kita untuk bisa mengakhiri situasi sulit ini dengan selamat.

Pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan tentang penyesuaian RKA K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil pembahasan Banggar. Yang kedua isu-isu aktual dan solusinya.

Pada kesempatan ini sebelum kami melaporkan kami juga sampaikan kepada Pimpinan Sidang, Para Pimpinan DPR RI tadi sudah disampaikan juga kami hadir di sini kalau kondisi ini memang kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita memang harus menjaga satu sama lainnya. Kami hadir juga di hadapan teman-teman para DPR RI yang terhormat. Kami juga sudah melakukan Swab dan rata-rata teman-teman kami di samping Swab juga rapid test untuk bisa melakukan Rapat Kerja pada sore hari ini.

### **Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.**

Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan semua bidang pembangunan perempuan dan anak merupakan manusia yang seutuhnya yang kebutuhan dan aspirasinya sepatutnya dipenuhi oleh semua bidang pembangunan. Sebelum kami menyampaikan substansi tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan Banggar, izinkanlah saya menyampaikan kembali kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting kami sampaikan agar kita semua mempunyai pandangan yang sama tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kelompok kementerian yang membidangi urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di mana kami berada dalam kelompok 3. Dalam melaksanakan tugasnya kementerian kelompok 3 menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Perpres No 65 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyempurnakan Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan dua fungsi tambahan yaitu untuk urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintah di bidang perlindungan anak yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan anggaran.

## **Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat, Sekretaris Kementerian beserta jajaran Eselon 1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 10 September 2020 tentang pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 serta isu-isu aktual dan solusinya telah disepakati beberapa hal sebagai berikut. Tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan Sidang bahwa:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.279.568.938.000 di mana Pagu total tersebut dijabarkan ke dalam program dukungan manajemen dan –mohon maaf mohon izin Bapak Pimpinan Sidang barangkali tadi terbalik- kalau untuk anggaran kami program dukungan manajemen adalah sebesar Rp.137.802.438.000 dan program kegiatan itu sebesar Rp.141.766.500.000. Jika dijabarkan menurut satuan kerja dapat kami sampaikan bahwa sekretariat kementerian memperoleh alokasi 111,1 miliar; Deputi Bidang Kesetaraan Gender 21,5 miliar; Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 21,7 miliar; Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 14,8 miliar; Deputi Bidang Hak Perempuan 8,2 miliar; Deputi perlindungan Khusus Anak 48,2 miliar; dan KPAI sebesar 13,9 miliar.
2. Yang kedua Komisi VIII DPR RI meminta sekretaris kementerian dan para pejabat eselon 1 agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

Tadi juga sudah disampaikan, mungkin kami tidak pertegas lagi mendukung usulan tambahan yang pada intinya sudah diputuskan bahwa tidak ada perkembangan berkaitan dengan penambahan anggaran baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian juga tambahan anggaran untuk KPAI.
3. Yang kedua segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK non-fisik pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun 2021 yang disimulasikan sebesar Rp.101.747.000.000. untuk program non fisik perlindungan perempuan dan anak di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota.
4. Kemudian mendorong agar ada inovasi yang lebih luas dalam menyusun rencana kerja program dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk seluruh provinsi kabupaten kota se-indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah Menindaklanjuti rekomendasi Komisi VIII DPR RI yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama, kami sudah melakukan FGD termasuk melibatkan pakar untuk menyempurnakan peta proses bisnis Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertajam penjabaran dan penyelarasan program dan rencana kerja. Hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat pencapaian prioritas arahan bapak presiden yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.

2. Yang kedua pendalaman dana alokasi khusus non fisik pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun anggaran 2021 juga telah diselesaikan melalui forum multilateral *meeting* bersama Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan.

### **Pimpinan sidang serta Hadirin yang berbahagia.**

Sampai hari ini, kami belum menerima informasi berkaitan hasil pembahasan Banggar. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa pembahasan Banggar untuk penambahan anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu termasuk KPAI belum membawa angin segar begitu ya Pimpinan Sidang.

### **Baik Pimpinan Sidang serta Hadirin yang kami hormati.**

Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan isu aktual atau strategis beserta solusinya. Kami mengelompokkannya ke dalam lima isu prioritas sesuai dengan arahan bapak presiden.

1. Yang pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Dua pendekatan dalam mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yaitu yang pertama *mainstreaming* atau memastikan isu gender atau isu perempuan terintegrasi ke dalam program kegiatan prioritas tentang kewirausahaan yang diampu oleh beberapa kementerian/lembaga yang selama ini kami sudah koordinasikan yaitu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Yang kedua menginisiasi model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang berada dalam kelompok rentan. Salah satunya adalah perempuan korban kekerasan. Model tersebut akan kami laksanakan 5 provinsi yaitu Aceh Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tentunya yang menjadi dasar pemilihan dari 5 provinsi tersebut adalah selain angka kekerasan relatif tinggi juga ketersediaan UPTD dan lembaga masyarakat seperti Asppuk kemudian Peka Perempuan Keluarga Kepala Keluarga di provinsi tersebut. Model ini akan kami laksanakan di tahun 2021.

Di masa pandemi Covid-19 ini. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan adalah bekerja sama dengan PT.PNM melalui penguatan pendamping yang saat ini jumlahnya 38.000 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota



di Indonesia dimana para pendamping nasabah Mekaar tersebut diharapkan dapat menyampaikan informasi dan pesan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang kemudian akan diteruskan kepada para nasabah Mekaar. Dari nasabah Mekaar ini dapat kami sampaikan itu ada sampai bulan ini ada 6,6 perempuan prasejahtera yang didampingi melalui program mekaar ini.

Yang kedua peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat berdampak pada perubahan cara belajar dengan menetapkan kebijakan *school from home* atau belajar di rumah melalui media daring. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada kondisi psikologis dan tingkat stres orang tua yang meningkatkan akibat peran ganda di rumah karena selain harus mengurus rumah dan bekerja orang juga dituntut harus menjadi guru bagi anaknya sendiri di rumah.

3. Yang ketiga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak pandemi Covid-19 menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan terdampak. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual. Data kekerasan, mungkin kami tidak akan sampaikan lagi ketika kita rapat kerja satu minggu yang lalu kami sudah sampaikan. Namun dalam kesempatan ini juga kami laporkan berkaitan dengan layanan Sejiwa sampai dengan 15 September 2020 terdapat 13.027 kasus terkait dengan perempuan dan anak melalui layanan di psikologi sehat jiwa.

### **Bapak/Ibu yang kami hormati.**

Jika dilihat dilihat dari hasil survei angka prevalensi maka masih ada kesenjangan yang sangat besar antara yang membutuhkan pelayanan dan yang mendapatkan pelayanan. Sampai saat ini layanan berbasis pemerintah UPTD/PPPA masih sangat terbatas. Pelayanan oleh masyarakat banyak dilakukan. Namun dengan kemampuan yang sangat bervariasi dan sebagian besar dilakukan dalam keterbatasan dan sumber daya yang sangat terbatas.

Demikian juga upaya yang kami lakukan itu adalah penyusunan keputusan bersama 5 menteri yaitu dari Mendagri, Menteri Desa, Mensos, Kepala BKKBN tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak pada masa Pandemi Covid-19. Kemudian juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Saat ini RPP Kebiri sedang dalam proses penetapan di Setneg.

Kemudian penyusunan proses bisnis layanan rujukan akhir korban kekerasan perempuan dan anak dan penguatan kelembagaan kabupaten kota layak anak khususnya penguatan peran forum anak hingga tingkat desa/kelurahan di mana pusat informasi Sahabat Anak, ruang bermain anak, pusat pembelajaran keluarga, atau Puspaga; sekolah ramah anak, madrasah

ramah anak, pusat kreativitas anak, dan tempat ibadah ramah anak. Untuk tempat ibadah agama lain sedang dalam pembahasan.

Kemudian mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dan saat ini telah terbentuk di 28 provinsi dan baru di 93 kabupaten/kota. Kemudian upaya yang kami lakukan juga dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah penyediaan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pengembangan mekanisme rujukan akhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Yang keempat, dari arahan bapak presiden itu adalah menurunkan perkawinan anak. Untuk mengakhiri praktik perkawinan anak di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya pada pasal 7 yaitu pendewasaan usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.
5. Kemudian untuk arahan presiden yang kelima, itu adalah mencegah pekerja anak. Terkait pekerja anak di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pengecualian untuk anak umur 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pekerja anak masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 2 untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak haruslah memerlukan koordinasi dan dukungan sektor terkait di antaranya Kemendikbud, Kemenaker, Kemenpar, Kemensos, Kemenag, Kemenlu dan Kemendes PDT. Tidak kalah pentingnya koordinasi dan dukungan dari daerah serta masyarakat.

#### **Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.**

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan bersama ini pula kami sampaikan bahwa melalui Rapat Kerja Komisi VIII ini kami mohon kerja sama dan dukungan Bapak Ibu sekalian agar kami dapat mengemban amanah ini dengan baik demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. Atas perhatian Ibu dan Bapak diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Bu Menteri atas pemaparannya singkat padat. Demikianlah penjelasan dari Ibu Menteri tadi sudah kita dengarkan semua untuk memperdalam masalah dan mungkin ada pertanyaan dan usulan. Kami persilakan para Anggota, mungkin ada yang mau nanya? Singkat, padat ya

Pak ya? Ini banyak sekali *full* nanya. Hari ini Bu yang datang, 3 yang nanya. Tidak? Silakan Pak, yang terhormat Bapak Samsu Niang.

**F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, Anggota Komisi VIII, Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Saya kira Pak Ketua ini kan penyesuaian anggaran dari komisi ke Banggar itu-itu saja terus yang dibahas. Mulai dari Bu menteri kemudian setelah itu sekretaris menteri. Jadi kita sudah paham semua dan kita sudah eksplorasi semua ini. Jadi saya kira tidak perlu ada lagi pertanyaan karena pertanyaan lagi nanti diungkap anggota dewan gitu aja yang berulang itu ya. Disimpulkan aja, tidak ada perubahan tidak ada penambahan anggaran apa yang mau dibahas? Kita sudah Ibu Menteri, sekretaris menteri sudah semua. Jadi *uneg-uneg-nya* anggota DPR sudah semua Pak Ketua disampaikan. Jadi saya kira lebih cepat lebih bagus. Terima kasih.

*Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Saya persilakan. Saya setuju tapi sama Pak Samsu Niang. Jadi memang kita sudah berjuang di komisi, sudah kita masukkan kesimpulan, Ibu Menteri. Kita juga sudah titip sama temen-temen di Banggar. Tapi kenyataannya memang hari ini kita dapat surat dari Banggar sepertinya belum bisa ada tambahan karena memang melihat ruang gerak fiskal yang sangat terbatas untuk itu ya saya persilakan Pak Husni singkat padat dan jelas.

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, Pak Ihsan, Pak Ace.  
Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun virtual.  
Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh jajarannya.**

Apa yang dikatakan Pak Samsu Niang dikatakan Pak Ketua, Pak Ihsan ya kita tidak korek-korek lagi. Anggaran ini cuma di sini sedikit ingin saya tambahkan bahwa tentang isu-isu aktual aja ya Bu ya. Ini kan masa Covid masa dimana pembatasan waktu, pembatasan gerak, kehilangan mata pencaharian, membuat banyak kepala-kepala keluarga sekarang tinggal di rumah kehilangan pekerjaan. Tapi kan juga hidup ini harus tetap berlanjut ya, anak-anak harus tetap sekolah malah biayanya uang sekolah tidak dipotong. Tapi biaya anak-anak ke sekolahnya makin besar harus ada kuota. Dan yang sangat menghawatirkan yang terjadi isu-isu di lapangan ini karena banyaknya

tersisa waktu anak-anak tersebut. Kalau dia kalau di tempat saya main ikan naga udah biasa. Ikan Naga tau kan Bu kan? Di Medan di bilang ikan Naga, ikan Gaduh. Apa namanya Pak Samsu Niang tuh? Laga lah ya? ikan laga ajalah ya. Main layangan atau dan lain sebagainya.

Tapi itu yang sangat yang sering terjadi ya sekarang karena ini laki-laki kalau ndak ada kerjanya Bu kau di rumah saja macam dia yang dilihat tembok ya akhirnya timbullah mungkin ya salah satu kekerasan terhadap istri dan anak. Kalau di kampung saya hari ini selama masa Covid ini saya percaya juga cukup-cukup tinggi ya. Mungkin akibat stres karena apa pendapatan ekonomi yang kurang. Jadi saya kira di sini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pemerintah ini harus mendorong tadi ibu katakan salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kewirausahaan ini ada 5 provinsi ada Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Saya dari kecil melihat bahwa wanita-wanita di Bali itu sangat tangguh. Itu saya tahu pasti itu mereka adalah sebelum masa Covid, dalam keadaan normal mereka adalah bahagian dari pencari apa menghidupi untuk keluarganya Pak Ketua. Jadi itu mungkin menjadi salah satu model untuk di-anu apa di negeri kita ini.

Kemudian juga di sini dikatakan salah satu permasalahan itu yang terakhir. Yang kelima itu pencegah pekerjaan anak memang ini, ini di sini sudah dari dulu. Apalagi masa Covid di ini mungkin isu masalah pekerjaan anak ini, apalagi yang sering terjadi ini di wilayah-wilayah pantai ini Bu. Wilayah-wilayah pantai mereka membantu nelayan mengambil ikan dan sebagainya dan ditambah lagi mereka tidak sekolah atau cuma yang dianggap daring itu kan waktu kalay salah saya sekarang kalau dulu kita sekolah dari pagi sampai sore kalau kita kecil-kecil dulu Bu mungkin sampai jam 2. Kita dulu sekolah ya. Sekarang cuma jam 10 udah selesai. Jadi banyak waktu. Waktu mereka lakukan untuk mereka melakukan membantu orang tuanya di dalam mencari nafkah. Jadi yang seperti ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita toleran seperti apa ibu katakan tadi kalau dia tidak, kalau bekerja berat tidak banyak menggunakan fisik ya mungkin kita lebih mentolerir di masalah ini ya Bu. Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak Husni memang kalau di tempatnya Pak Husni katanya tingkat perceraian tinggi. Kalau di tempat saya tingkat kehamilan yang tinggi Pak. Silakan Pak yang terhormat Pak Jefri.

#### **F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.  
Juga yang terhormat Bu Menteri beserta jajarannya.**

Saya setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Samsu Niang yang ataupun Pak Husni tadi ya. Setidaknya main kalau anggaran ya sudah tidur semakin di korek-korek lagi ya karena memang pasti ya seperti itu dan segitu-gitunya. Tapi dari paparan Bu Menteri tadi saya ada beberapa hal menarik yang rasanya ingin penjelasannya. Tadi disebutkan di paparan anda layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi nasional dan internasional. Nah ini bagaimana kalau saya tangkap ini kayak semacam mungkin apakah ini biaya koordinasi? Apakah dana ini memang dibagi rata ke semua kota? Menurut hemat saya dana sebaiknya digunakan untuk membentuk dan menguatkan layanan perlindungan anak tanpa label khusus dan koordinasi nasional dan internasional yang memang kasusnya mungkin belum tentu ada juga.

Kemudian terkait dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, saya belum melihat *action plan* yang *real* yang bisa dirasakan langsung oleh perempuan wirausaha. Barangkali mungkin belum terbiasa menjabarkan lebih spesifik mengenai ini. Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Baik dari fisik sudah dan virtual tidak ada pertanyaan sampai saat ini. Saya persilakan dari meja pimpinan Pak? Cukup. Baik. Menteri dari saya sedikit saja bahwa ya memang kita sudah berjuang Bu Menteri untuk kenaikan anggaran. Tapi ya mungkin belum ya belum ya belum saat ini karena memang dari awal juga Pagu Anggaran sudah diketok kita belum dapat sinyal-sinyal untuk kenaikan anggaran dan juga termasuk untuk teman-teman KPAI. Kami juga agak sedih juga nih. Tapi ya apa mau dikata gitu karena memang anggaran kita sangat terbatas 2021 banyak dipakai untuk Covid dan juga banyak sekali pembangunan-pembangunan yang tertunda. Tapi bukan kemudian masalah perempuan dan anak tidak menjadi prioritas. Tetap itu menjadi prioritas kami gitu insya Allah nanti ke depannya mungkin kita akan koordinasi lebih baik lagi. Silakan Bu menteri kalau mau dijawab pertanyaan dari temen-temen.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Terima kasih Pimpinan Sidang. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang hadir secara *offline* pada rapat kerja ini. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tadi juga disampaikan oleh Pimpinan Sidang berkaitan dengan penambahan anggaran yang kami dari kementerian menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami sangat merasakan *support* teman-teman di Komisi VIII sangat besar terhadap kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kita juga sangat memahami ini adalah situasi yang sulit kami sangat memaklumi

mudah-mudahan dengan anggaran yang kami dapatkan 279 miliar tersebut bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin tidak terlepas juga dari dua tambahan tusi yang kami dapatkan di kementerian ini berkaitan dengan Perpres 65 2020. Karena kalau kita bicara tambahan Tusi ini seperti apa yang menjadi pertanyaan Pak Jefry juga, layanan-layanan rujukan akhir lintas provinsi nasional dan nasional dan internasional ini tidak terlepas dari pada anggaran. Tapi mudah-mudahan situasi yang sulit ini juga memotivasi kami di kementerian untuk lebih kerja ekstra lagi. Mudah-mudahan dan yang bukan menjadi hambatan bagi kita semua tapi semangat tetap harus kita bangun dalam hal memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia.

Berkaitan dengan layanan koordinasi nasional Pak Jefry. Nah salah satu contoh riil yang bisa kami sampaikan kemarin itu adalah ada berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh kemarin itu ada di Palembang yang di Palembang. Kalau berkaitan dengan perdagangan orang ini aslinya adalah ada dari NTT. Nah itu kalau misalnya berkaitan dengan pendampingan dan sebagainya mana yang mungkin bisa didanai oleh daerah. Kalau sudah lintas provinsi itu dengan tambahan Tusi ini akan menjadi eksekusi kami di kementerian ini. Kalau dulu berkaitan dengan Perpres 59 kami hanya murni sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. Tapi dengan tambahan Tusi berdasarkan Perpres 65 ini, inilah yang merupakan rujukan akhir ini akan menjadi tanggung jawab kami di kementerian ini, ketika ada permasalahan lintas provinsi harus menjadi tanggung jawab kami di kementerian yang bisa kita sudah langsung eksekusi berdasarkan Perpres 65 2020.

Kemudian sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan kewirausahaan. Berkaitan dengan arahan bapak presiden yang pertama-tama itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan ini. Kami mencoba di kementerian ini dan mungkin teman-teman Komisi VIII sangat memahami dengan keterbatasan anggaran ini. Maka inovasi-inovasi yang kami lakukan ini adalah membangun jejaring. Membangun jejaring tidak hanya dengan yang dengan kementerian/lembaga juga kami bangun dengan para dunia usaha yang ada untuk memberdayakan perempuan-perempuan. Sedangkan ke depan di tahun 2021 ini terkait dengan pemberdayaan perempuan yang kami tangani di bidang kewirausahaan ini kita akan fokus. Mungkin satu minggu yang lalu kami juga sudah sampaikan, yang kita akan berdayakan untuk konsep dari hulu ke hilir dalam penanganan kekerasan ini dari pencegahan, penanganan, pelayanan, sampai pemberdayaan kalau perempuan dan pemberdayaannya ini adalah yang kita akan berdayakan dalam hal di bidang kewirausahaan ini adalah:

1. Itu adalah penyintas. Para korban penyintas.
2. Penyintas yang kedua adalah perempuan kepala keluarga.
3. Yang ketiga itu adalah perempuan-perempuan prasejahtera.

Di mana tadi kami sudah sampaikan berkaitan dengan perempuan prasejahtera ini kami kementerian ini sudah bersinergi dengan PT. PNM dan di sana mereka sudah memberdayakan sampai saat ini 6,6 juta perempuan

prasejahtera yang sudah diberdayakan yang bekerja sama dengan kami yang kita bangun koordinasi dengan PT. PNM. Itu yang berkaitan dengan pemberdayaan. Kita akan fokus kita tidak akan mengambil ranah yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan kita akan fokus memberdayakan perempuan-perempuan penyintas itu. Perempuan kepala keluarga dan perempuan-perempuan prasejahtera.

Tadi Pak Husni juga menyampaikan berkaitan dengan apa kita fokus 5 daerah itu Pak. Nah kami ke depan juga sudah menyampaikan dengan teman-teman di kementerian yang kita bangun bagaimana program ke depan itu betul-betul dengan anggaran yang minimal ini, program yang kita lakukan terintegrasi dan holistik. Jadinya kita sudah membangun kriteria. Para deputi putih tidak akan turun ke daerah sendiri-sendiri tapi sinergitas itu yang kita bangun. Sekali kita turun ke daerah apa yang dikerjakan oleh deputi A B begitu kita keroyokan secara bersama-sama sehingga lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Demikian juga saya pikir untuk memudahkan teman-teman di daerah tidak sering dikunjungi dengan kegiatan yang kecil-kecil. Tapi sekali kita turun adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersinergi lintas kementerian. Itu yang kita lakukan tapi dengan kriteria-kriteria yang kami sampaikan tadi di daerah yang tingkat kekerasannya tinggi. Tentunya kita juga melihat berkaitan dengan apa namanya karena kita sangat paham sekali dalam hal penyelesaian permasalahan itu. Setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda-beda. Demikian juga ada budaya yang berbeda-beda makanya lokus yang kita tentukan itu adalah ada yang di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat yang akan kita jadikan pilot project dalam penanganan baik pemberdayaan perempuan pengasuhan, demikian juga penurunan kekerasan, pencegahan perkawinan anak ini kita lakukan secara terintegrasi di lintas kementerian.

Terima kasih Pak Samsu Niang yang telah. Memang kami juga ketika kami mendapatkan undangan dari rapat kerja pada hari ini kami juga menyampaikan kepada Sesmen perkembangan dengan Banggar bagaimana karena undangan rapat kerja ini kan adalah membahas rencana dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan hasil Banggar. Tapi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi VIII. Kami sangat memaklumi ini adalah kondisi yang sulit untuk kita semua dan mudah-mudahan dengan anggaran yang ada kami tetap bisa memaksimalkan apa yang menjadi tugas kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak/Ibu.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Bu Menteri. Demikianlah jawaban dari Saudara Menteri PPPA. Selanjutnya selaku pimpinan rapat kami akan bacakan draf kesimpulan rapat pada hari ini. Silakan. Ditampilkan. Ya nanti setelah ini kita sepakati kemudian akan menjadi dari draf menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI. Masalah teknis. Tapi Pak Ace dapat surat dari Badan Anggaran sudah dapat ya? Atau baru dapat dari sekretariat barusan?

Ya karena memang besok Ibu kalau nggak salah hari Kamis sudah mulai bahas RUU maka kita harus menyelesaikan hari Rabu paling terakhir. Sedangkan besok sudah terjadwal untuk Kementerian Sosial dan juga Kementerian Agama untuk pembahasan anggaran terakhir peresmian. Oke saya baca langsung.

Draf kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2020-2021, Selasa 22 September 2020 dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda penyesuaian - salah ketik ini- penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran tahun 2021 Kementerian PPPA RI dan isu-isu aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2021 sebesar Rp.279.568.938.000 terdiri dari:
  - a. Program Kesetaraan Gender Perlindungan Anak Rp.142.352.415.000 dan;
  - b. Program dukungan manajemen Rp.137.216.523.000 dengan total tadi sudah saya sampaikan Rp.279.508.938.000.

Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi program-program inovatif dan penguatan kelembagaan serta koordinasi -dalamnya dua kali- dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa pandemi -miknya pakai k- dan menjadi prioritas baik dari sisi strategi, metode, dan teknis pelaksanaan.

**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Sekali ya? Dukungan manajemennya?

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Betul Pak itu bergeser Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bu Menteri kalau ada tanggapan.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Dari sini Pak itu kalau disini dukungan manajemennya 137.802.438.000. Iya program kesetaraan gendernya 141.



**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Rp. 137.802.438.000. Ya begitu ya? Gitu ya. Tenaga ahlinya kalau sama uang kelihatannya nggak-nggak cepat deh. Udah bener jadinya program ini 9,6 ya? Kalau dari 802.438 Mas.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ace sebelum diketok apakah harus ... lagi atau?

**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Enggak udah segini. Udah final ya? 802.438. Titik. Kenapa? 8 nya dicoret yang satunya diawal. Bukan, bukan yang belakang awalnya dicoret tuh. Dibelakang dua. Bukan bukan. 438. Ya 8 disitu. Terus satunya 141. Begitu ya Bu ya?

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Izin juga programnya program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak. Kurang perempuannya Pak. Program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak kurang programnya.

**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Jangan sampai perempuannya hilang. 141.766.500.000. Jangan malu-maluin Ibu Menteri ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya masih ada harapan katanya Pak Samsu Niang. Saya kurang paham saya belum pernah di Badan Anggaran dan baru jadi pimpinan kali ini. Jadi mohon maaf ini kurang paham. Tapi terus terang saya berharap sih masih bisa di ditambah ini. Kalau Pak Samsu Niang memang beliau ini optimis sekali tapi kan masalah realisasi saya enggak yakin juga ini. Tapi saya rasa Pak Sekretaris ini harus segera menghadap lah. Mungkin ditemani teman-teman komisi yang di Badan Anggaran disini ada Ibu Harmusa, Pak Arwan Aras, Pak Alit Kelakan, Ibu Itje. Nanti bisa kontek beliau-beliau ini. Baik Ibu Bapak, Ibu Menteri cukup yang di bawah nomor dua oke? Saya persilakan dari anggota mungkin? Cukup? Baik karean tadi sudah kita revisi dan juga sudah kita tanggapin semua maka kita sepakati kesimpulan tadi menjadi kesimpulan rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum rapat ini ditutup saya mempersilakan kepada Saudara Menteri PPPA untuk menyampaikan kata akhirnya. Silakan Ibu.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

**Pimpinan Komisi VIII dan Bapak Ibu Anggota Komisi VIII yang kami hormati.**

Pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan dukungan yang kami rasakan tidak hentinya dari teman-teman Komisi VIII dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan mohon *support* dukungan

teman-teman di wilayahnya masing-masing untuk selalu mendampingi kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga ke depan program kami tepat sasaran yang tidak terlepas dari teman-teman selaku wakil rakyat yang paling tahu permasalahan di wilayahnya masing-masing. Kemudian cara penanganannya seperti apa, seperti apa yang kami sampaikan tadi bahwa karakter daerah itu berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih atas *supportnya* dan kami mohon dukungan dan pendampingan dari Bapak Ibu dari Komisi VIII kepada kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Menteri.

**Hadirin yang saya hormati.**

Dengan demikian berakhirlah rapat kita pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Menteri PPPA Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang sudah hadir. Juga kepada para anggota Komisi VIII dan para pimpinan Komisi VIII yang hadir pada rapat hari ini atas seluruh usahanya ikhtiarnya kita memperjuangkan mitra kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Izin Pak Ketua. Lupa lupa lupa sekali lupa sekali.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Ini kan anggaran bentuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu-itu saja terus. Kemarin biasanya ini tadi kita lupa memasukkan tambahan untuk tambahan anggaran supaya tahun berikutnya itu di menjadi prioritas. Jadi selama ini saya melihat setiap kementerian itu harus ada di kesimpulan dimasukkan tambahan anggaran gitu apa yang menjadi keinginan keinginan kementerian itu ke depannya. Supaya nanti berikutnya penganggaran berikutnya itu sudah sinkron menjadi karena kesimpulan kita ini meningkat. Kesimpulan Komisi VIII itu mengikat.

Jadi olehnya itu sebelum ditutup mungkin nanti setelah ditutup bisa ditambah redaksinya untuk tambahan koordinasi dengan Ibu Menteri apa kira-kira ke depan. Karena ini ke depannya itu menjadi apa namanya prioritas bahwa di Komisi VIII menjadi prioritas bahwa ada permintaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tambahan anggaran tahun berikutnya. Kalau ada perubahan berikut yaitu sudah bisa dianggarkan itu untuk menjadi prioritas. Karena kita kesimpulan mengikat itu aja Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya serahkan kepada floor. Apakah kita balik lagi ke kesimpulan untuk membuat tambahan gimana Ibu Menteri? Atau ya kesimpulan yang tadi saja nanti baru kita buat lagi ke depannya gimana? Bu Menteri. Ya boleh silakan.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Terima kasih sudah mengingatkan kalau seandainya masih diizinkan kalau itu yang menjadi dasar berkaitan dengan tambahan anggaran ini sebenarnya kami punya dasar yang kuat, kenapa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diperlukan tambahan anggaran, karena kami ada tambahan dua kewenangan yang diberikan oleh bapak presiden. Mungkin itu Pak yang dapat kami, punya dasar yang kuat ketika kita bicara tambahan anggaran kepada kementerian ini.

**KETUA RAPAT:**

Baik saya rasa kita bisa balik lagi ke kesimpulan. Kita ikut aja kalau Ibu Menteri bilang balik ya balik. Iya Pak Samsu Niang bilang balik, balik. Cuma Pak Samsu Niang sudah agak terlambat itu. Ya.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Saya ingin ini juga kita belum *explore juga DAK* jangan DAK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan nanti sementara kita juga Bu Menteri nih takutnya dia punya kluster anggaran tapi sedikit yang dia bisa intervensi karena sifatnya koordinasi. Nah kayak kita kan juga memperjuangkan salah satunya anggaran untuk DAK saya pengen tahu juga belum menteri punya nggak? Punya apa? Punya wewenang untuk mengatur misalnya dia apa itu ke kabupaten mana aja? Programnya untuk apa? atau total diserahkan ke pemerintah daerah? Itu satu.

Yang kedua berapa sih sebetulnya anggaran menteri di kementerian nya yang memang Bu Menteri bisa atur untuk operasionalisasi, apakah itu memang ranahnya deputi atau Bu menteri mengatur pola kerja anggaran? Karena ini kan ada masalah manajemen ya bukan berapa anggarannya tapi berapa sebetulnya yang belum menteri bisa manage langsung secara pribadi untuk mengatur program-program kerja kementerian atau memang ada kesulitan itu dalam manajemen anggaran di dalam kementerian ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik ya bagus sekali Bu Diah ini mau saya tutup ini jadi balik lagi. Nih jadi balik lagi nih nggak papa deh. Tapi ini terakhir habis nih ditutup. Silakan Bu Menteri kalau bisa jawab. Nanti kalau memang perlu dimasukkan silakan.

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Kalau masuk kesimpulan, saya pikir kesimpulannya sudah masuk semua. Ini apa yang bisa ditanyakan oleh Bu Diah berkaitan dengan DAK. Nah, ketika kita bicara dia kan walaupun itu dananya akan menggelontorkan

daerah tapi kita kementerian itu akan punya bargaining position ke daerah. Salah satu berkaitan dengan daerah mana yang akan mendapatkan anggaran itu tidak terlepas dari pada intervensi kita di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Itu tidak masalah Bu Diah itu walaupun itu mengalirnya daerah tapi kita punya gengsi juga turun minimal ketika kita turun bisa mengintervensi daerah yang mendapatkan anggaran berkaitan dengan layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Nah kalau kita melihat bentuknya dari submenu itu kan memang ada bantuan operasional pelayanan korban, kemudian Bantuan Operasional terhadap kekerasan. Termasuk TPPPU demikian juga Bantuan Operasional penguatan UPTD.

Kemudian berkaitan dengan anggaran di Kementerian kalau kita memang anggaran itu. Kalau kita bicara masalah kegiatan pasti akan ke deputi tapi tidak terlepas kendalanya ada di menteri karena menteri adalah pengguna anggaran kita, kuasakan kepada para deputi yang ada. Mungkin kita masih punya wewenang walaupun itu dikelola oleh deputi. Tapi deputi adalah selaku kuasa pengguna anggaran yang diberikan oleh menteri mungkin itu Bu Diah.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu. Kita kembali lagi ke kesimpulan di laptop deh sambil menunggu kena virus pandemic. Sambil menunggu nih Bu Menteri tadi pernyataan Bu Diah sepertinya menarik ya. Tapi apakah memang perlu dimasukkan dalam kesimpulan saya rasa nggak nggak perlu ya? Jadi nanti yang kita masukkan dalam kesimpulan intinya terkait dengan 2 tusi yang baru, maka kami mendorong supaya ke depannya ada penambahan anggaran seperti itu ya Pak Samsu Niang ya?

Ya nomor 3 silakan Bu mungkin kalimatnya. Ya terkait dengan ya terkait dengan tambahan, tambahan 2 tugas dan fungsi Kementerian PPPA:

Apa Bu tusinya apa Bu nggak saya rasa nggak papa. Kita terus aja. Terkait dengan tambahan dua tugas dan fungsi yaitu penyediaan layanan rujukan akhir, rujukan akhir bagi? Bagi perempuan korban kekerasan terus yang B? Oh provinsi dan daerah lintas provinsi itu 2 itu maksudnya provinsi dan. Oke B berarti B ya b lintas internasional juga tuh kekerasan tingkat provinsi dan nasional dan lintas internasional. Betul? lintas nyagak pakai ya? Provinsi, nasional, lintas provinsi terus lintas provinsi dan internasional enggak usah dulu tingkatnya di atas dihapus. Tingkat nasional koma begitu ya? Oke selanjutnya.

#### **MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.I):**

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

#### **KETUA RAPAT:**

A B maka Komisi VIII terus penambahan anggaran dimana?

**MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):**

Maka diperlukan penambahan anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Apa? Oh mendukung. Baik kita bisa lihat sekali lagi Bu. Nomor 3. Komisi VIII DPR RI mendukung penambahana anggaran sebesar Rp.156.500.000.000 terkait dengan tambahan dua tugas dan fungsi Kementerian PPPA:

- a. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional.
- b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Begitu Pak Samsu Niang. Saya kalau yang ngomong *future* ini agak kurang panjang. Oh. Oke. Oke. Atau siapa tahu ada tambahan dari Badan Anggaran di 2021 bisa masuk ini dulu. Oke. Ya betul-betul. Ya. Otomatis. Baik. Baik Dengan demikian dengan persetujuan kesimpulan rapat tadi maka berakhirlah rapat pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PPPA RI kepada seluruh jajaran kepada anggota dan pimpinan Komisi VIII yang berkenan hadir pada acara rapat hari ini. Semoga keputusan yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seluruh Indonesia. Dan kami yakinkan kepada Ibu bahwa Komisi VIII baik itu pimpinan dan seluruh anggota akan terus berusaha berikhtiar berusaha dan berdoa untuk mendukung program-program Kementerian PPPA tapi untuk hari ini memang kita harus ikhlas karena walaupun kita tetap cantumkan pada kesimpulan walaupun nanti ada baik itu di APBN murni di 2021 maupun di APBNP itu sudah kita siapkan. Sementara ini yang selalu dikatakan saudara Jefry innalaha ma'ashabirrin bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih. Acara ini saya tutup dengan membacakan hamdalah.

*Alhamdulillahirobbilalamin.*

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariq*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL: 15.32 WIB)**

**Jakarta, 22 September 2020**

**a.n. KETUA RAPAT**

**SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197309261997031001**